

KAPASITAS FISKAL DAN PDRB DENGAN TINGKAT KEMISKINAN: STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH (2009-2013)

A. Alimuddin Rauf

andialimuddinrauf@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Perluasan Wilayah Perdesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to measure and identify local fiscal capacity in the implementation of fiscal decentralization, and simultaneously measuring the relationship between the fiscal capacity of the area and the GDRP against poverty. Variables used in this research are the fiscal capacity, Gross Domestic Regional Product (GDRP), and a variable poverty. The data used in this research is secondary data from 10 district and one city in the province of Central Sulawesi with a period of 2009 - 2013. In general, the study concluded that the Gross Domestic Regional Product (GDRP) and the fiscal capacity of a statistically significant effect on poverty, which means that the fiscal capacity in 10 district and one city in the Province of Central Sulawesi could be improved to encourage economic growth. Government policies in the budget affect the capacity of the fiscal, economic growth, and poverty in the Province of Central Sulawesi. Recommendations from this study is that the local government should be concerned about the increase in fiscal capacity and Gross Domestic Regional Product (GRDP) and local governments are required to increase their responsibilities so that all areas can improve their welfare.

Keywords: *fiscal capacity, Gross Domestic Regional Product (GDRP), poverty, fiscal policy*

Babak baru penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimulai dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah di seluruh di Indonesia pada 1 Januari 2001. Sebagaimana diketahui, hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali pada lima bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, dan Fiskal.

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, kemudian di revisi lagi dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan kemudian di ubah lagi melalui Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini memberi nuansa baru pada perekonomian Karena sebelumnya banyak daerah di Indonesia mengeluhkan kurangnya kemampuan fiskal guna membiayai kebutuhan fiskal daerahnya, maka dengan lahirnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini sedikit banyak mengurangi keluhan para pimpinan daerah.

Kebutuhan fiskal yang dimiliki oleh daerah juga berhubungan dengan

pembangunan sosial di masing-masing daerah.

Pembangunan sosial merupakan aspek yang penting setidaknya karena tiga alasan.

Pertama, aspek sosial adalah ukuran yang jelas sebagai hasil pembangunan ekonomi. Peningkatan dalam indikator-indikator ekonomi tidak banyak artinya jika tidak ada peningkatan indikator-indikator sosial.

Kedua, ada keterkaitan antara dua rangkaian ini. Pendapatan yang tinggi menghasilkan kapasitas untuk tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, standar kesejahteraan yang lebih besar akan menghasilkan produktivitas dan efisien yang lebih tinggi.

Ketiga, kemajuan sosial berperan dalam kohesi dan kerukunan masyarakat (Sebayang, 2008).

Perlu digarisbawahi bahwa dengan desentralisasi fiskal berdasarkan undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan proses politik melalui kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ketiga periode ini akan mempengaruhi utilitas maksimum yang diperoleh masyarakat melalui sektor publik.

Rumusan Masalah

Banyak yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan, kesehatan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik ketimbang bila langsung diatur secara tersentralisasi oleh pemerintah pusat.

Namun kecenderungan ke arah tersebut tidak sepenuhnya kelihatan karena hingga saat ini sebagian besar Pemerintahan Daerah

(Pemda dan DPRD) kota dan kabupaten serta provinsi di Indonesia merespon konsepsi desentralisasi fiskal dengan menggenjot kenaikan PAD melalui pajak dan retribusi nampaknya tidak diimbangi dengan peningkatan efektifitas pengeluaran APBD. Langkah kebijakan semacam ini dapat berpengaruh buruk di tingkat daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Bagi sebagian besar provinsi, masalah di atas merupakan agenda pokok yang perlu segera dituntaskan, salah satunya adalah jumlah penduduk miskin yang relatif masih besar.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas maka pertanyaan penelitiannya adalah:

- a. Apakah ada keterkaitan antara desentralisasi fiskal (berbentuk kapasitas fiskal) dan PDRB dengan tingkat kemiskinan.
- b. Bagaimana bentuk keterkaitan antara desentralisasi fiskal (berbentuk kapasitas fiskal) dan PDRB dengan tingkat kemiskinan.

Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi kapasitas fiskal daerah dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal.
- b. Mengukur hubungan antara kapasitas fiskal yang dimiliki daerah dan PDRB dengan tingkat kemiskinan.
- c.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Keterkaitan Desentralisasi Fiskal sebagai *Political Proses* dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Lesta Karolina Sebayang yang hasilnya dimuat dalam *JEJAK*, Volume 1, Nomor 1, September, 2008. Dengan menggunakan regresi data panel dengan metode *Generalized Least Square* (GLS) dan model *fixed effect* untuk data 26 provinsi di Indonesia Tahun 1999-2002.

Penelitian ini menemukan bahwa: (a). Kapasitas fiskal masing-masing daerah

berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Berarti ketika kapasitas fiskal meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Perbedaan kapasitas fiskal masing-masing daerah juga akan mempengaruhi pengalokasian atau skala prioritas juga akan bervariasi dan (b). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan berarti ada stimulus fiskal terhadap kemiskinan.

Penelitian lain yang terkait dengan tesis ini sifatnya terpisah seperti hubungan antara PDRB dengan Kemiskinan yang dilakukan oleh Busra (Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Aceh” dengan menggunakan model ekonometri menemukan bahwa Variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh selama kurun waktu penelitian yaitu Tahun 2007 sampai 2011. Pengaruh yang signifikan terlihat dari nilai *t*-statistik pada *degree of freedom* sebesar 5 persen, yakni nilai *t*-statistic lebih besar dari nilai *t*-tabel ($2.727 > 1.657$).

Sementara Hubungan antara Kapasitas Fiskal terhadap Kemiskinan dilakukan oleh Purwiyanti Septina Franciari, FX. Sugiyanto yang dimuat dalam Diponegoro *Journal Of Economics* dengan judul Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal dan Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008 dan 2010).

Khusus hubungan antara Kapasitas Fiskal dan Kemiskinan ditemukan bahwa Perhitungan matriks korelasi pada tahun 2008 dan 2010 menunjukkan hubungan variabel kapasitas fiskal dengan variabel kemiskinan adalah tidak searah.

Ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai pada variabel independen akan diikuti dengan penurunan nilai variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai variabel independen turun, maka nilai variabel dependen akan naik. Pada tahun 2008, dapat dikemukakan

bahwa hubungan antara kapasitas fiskal dan kemiskinan (-0,272539) adalah lemah. pada tahun 2010 terdapat hubungan yang lemah antara kapasitas fiskal dan kemiskinan (-0,354811).

Hasil dari matriks korelasi antara kapasitas fiskal dengan kemiskinan, terlepas apakah hubungannya signifikan atau tidak secara statistik, menunjukkan bahwa hubungan tersebut terkonfirmasi benar secara teoritis. Kapasitas fiskal mempengaruhi kemiskinan secara negatif, artinya semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka kemiskinan di daerah tersebut akan semakin rendah.

Desentralisasi Fiskal

Istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud dapat tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *tax policy*.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dalam konteks kegiatan ini, pengertian kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Fiskal dan Kapasitas Fiskal

Kebijakan di suatu daerah dapat mempunyai konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Suatu kebijakan publik mestinya lebih banyak diarahkan pada

upaya pencapaian utilitas tertinggi dari masyarakat. Pada pelaksanaannya banyak sekali yang menjadi hambatan antara lain anggaran yang terbatas. Penerimaan suatu daerah malah seringkali tidak dapat menutup pos pengeluaran sekalipun belanja rutin. Oleh karenanya kegiatan pemerintah meliputi realokasi penggunaan sumber-sumber dari pihak swasta pada pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri kemudian kekuatan kompromi politik kemudian menentukan arah kebijakan. Salah satu imbas yang dirasakan daerah adalah adanya perubahan perundang-undangan. Menurut Aschauer (2000), persoalan kebijakan fiskal pemerintah mencakup “*how much you have*”, “*how you pay for it*” dan “*how you use it*”.

Chetwynd, *et.all* (2003) menjelaskan bahwa tingginya kapasitas fiskal akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas produksi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi inilah kondisi kemiskinan akan dapat diperbaiki.

Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kanbur dan Squire (1999) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin, akan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Eric Chetwynd, *et.all* (2003) menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas fiskal menyebabkan anggaran yang tersedia akan tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak menyediakan layanan publik yang berkualitas. Buruknya layanan publik ini membuat kondisi kemiskinan akan semakin buruk.

Kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain. Buruknya pelayanan pemerintah mempengaruhi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, terutama pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan orang-orang berpenghasilan rendah sangat bergantung pada layanan pemerintah sebagai kebutuhan dasar (seperti pendidikan dan kesehatan). Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif (Eric Chetwynd, *at.all*, 2003).

Kemiskinan

Kemiskinan dapat menimbulkan tindakan kejahatan dan gangguan sosial lainnya. Adanya sistem baru memberikan harapan kerja dan mengurangi *welfare trap*. Sistem tersebut berupa dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah (Hyman; 239).

Program pemerintah dalam memberikan bantuan pada orang miskin merupakan hal penting. Penerima bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk bantuan tunai atau bentuk bantuan lainnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi sebelum mendapatkan bantuan penerima harus melalui tes. Tes tersebut mengenai status pendapatan dan tingkat aset yang dimiliki penerima bantuan. Program pemerintah untuk membantu kaum miskin dapat berupa transfer tunai secara langsung, perlengkapan berupa kebutuhan dasar seperti kesehatan, subsidi untuk tempat tinggal dan makan dan program-program lainnya.

Kanbur dan Squire (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan

anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja memiliki *skill* yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatan meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak pro-kemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana diketahui, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensinya, sejalan dengan desentralisasi tersebut aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasi daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri dana pembangunannya, tetapi banyak daerah di berbagai negara belum mampu membiayai seluruh pengeluaran daerah. Implikasi dari kondisi tersebut transfer dana dari pemerintah pusat (*intergovernmental transfer*) merupakan sumber penerimaan yang amat dominan bagi pemerintah daerah di banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Kapasitas fiskal masing-masing daerah akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Adanya peningkatan kapasitas fiskal diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kapasitas fiskal dan kemiskinan mempunyai hubungan searah, yaitu kapasitas fiskal mempengaruhi kemiskinan tetapi kemiskinan tidak mempengaruhi kapasitas fiskal. Ini sesuai dengan penelitian dari Kanbur dan Squire (1999) serta Chetwynd, *et.all.* (2003).

Kanbur dan Squire menjelaskan bahwa

kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin, akan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Chetwynd, *et.all* menunjukkan bahwa kemampuan mengatur kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain.

Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperkirakan berpengaruh terhadap kemiskinan, semakin tinggi pertumbuhan PDRB akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, bahkan World Bank (2007) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya penggerak terpenting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, upaya menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin membutuhkan upaya menciptakan pertumbuhan sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh penduduk miskin.

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Banyak faktor lain selain pertumbuhan pendapatan yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di

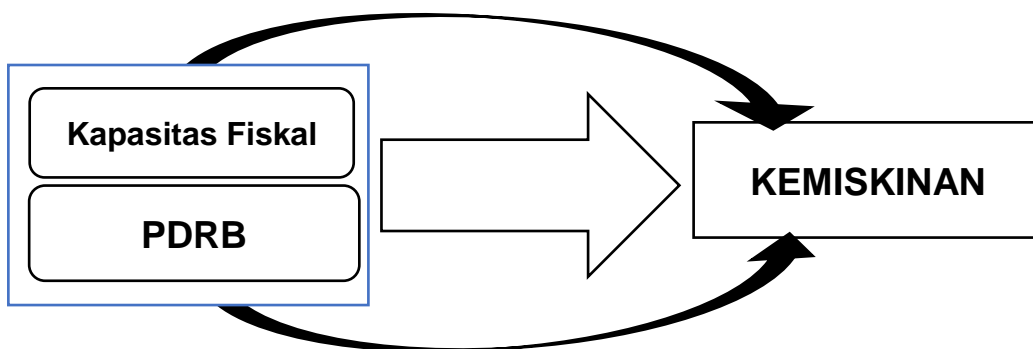
suatu Negara/daerah, seperti derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Hasil penelitian dari Ravallion dan Chen (1997) yang menggunakan data dari survei-survei pendapatan/pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) di 67 NSB dan Negara-negara transisi untuk periode 1981-1994 juga menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan hampir selalu berbarengan dengan peningkatan pendapatan rata-rata per kapita atau standar kehidupan, dan sebaliknya kemiskinan bertambah bila terjadi kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil plot antara perubahan laju kemiskinan (dalam log) dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antar-survei menunjukkan suatu tren yang negatif.

Sedangkan hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993)

dengan metode yang sama (analisis lintas Negara) menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu Negara akan semakin rendah jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan. Juga, studi yang dilakukan oleh Wodon (1999) dengan memakai data panel regional untuk kasus Bangladesh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi tingkat kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Hasil penelitian Chairul Nizar (2013) menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan.

Baik secara terpisah ataupun bersama-sama, Kapasitas Fiskal dan PDRB berpengaruh terhadap Kemiskinan,



Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah:

- a. Diduga bahwa Kapasitas Fiskal berpengaruh pada tingkat kemiskinan, dalam artian ketika kapasitas fiskal meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
- b. Produk Domestik Regional Bruto Bentuk hubungan antara variabel(PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan, yang berarti ketika PDRB meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif adalah menghubungkan dua variabel atau lebih.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah 10 Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan waktu penelitian sekitar tiga bulan.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Data APBD diperoleh diperoleh melalui situs Kementerian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.go.id), Data PDRB dan Kemiskinan diperoleh dari publikasi BPS Sulawesi Tengah (www.sulteng.bps.go.id).

Instrumen Penelitian

Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus (DAK), dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas fiskal diukur pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Rumus Kapasitas Fiskal menurut Permenkeu No 174/PMK.07/2009 Tentang Peta Kapasitas Daerah sebagai berikut:

Kapasitas Fiskal = [(Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Lain-lain Pendapatan yang sah) – Belanja Pegawai] / Jumlah Penduduk Miskin].

PDRB

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan

oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (Hanggar Yudha, 2011, Kemiskinan dan Kesenjangan).

Analisis Model Regresi

Dalam penelitian ini, digunakan Analisis Model Regresi data panel. Data Panel adalah merupakan kombinasi dari data runtut waktu dan silang tempat yaitu memiliki observasi dari analisis unit pada titik waktu tertentu.

Menurut Wibisono (2005) Keunggulan regresi data panel antara lain:

Pertama. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu;

kedua. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.

Ketiga, data panel mendasarkan diri pada

observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.

Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (*multikolinearity*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.

Keenam, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut, maka implikasi pada ketidak-harusan dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam Shochrul R, Ajija *et all*, 2011).

Regresi data panel berbeda dengan regresi runtut waktu (*time series*) dan regresi silang tempat (*cross section*).

Dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel – variabel bebas yakni Kapasitas Fiskal dan Produk Domesik Regional Bruto terhadap variabel terikat yakni jumlah penduduk miskin digunakan model ekonometrika dengan meregresikan data panel yang ada dengan menggunakan metode OLS dan GLS. Variabel – variabel tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk fungsi dan selanjutnya dibuat dalam bentuk persamaan regresinya, yaitu:

Kemiskinan = f (kapasitas fiskal, PDRB)

Kemudian fungsi di atas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{kap_fiskal} + \alpha_2 \text{PDRB}_{2t} + u_i \dots\dots\dots$$

Pada dasarnya model persamaan ekonometrika dalam penelitian ini menggunakan model yang sama (replikasi) yang dilakukan oleh Sebayang (2008).

Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan (*poor*) – sebagai variabel independen yang menunjukkan kondisi sosial-ekonomi.
- b. Kapasitas fiskal (*kap_fiskal*) diukur dengan rumus = [(Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Lain-lain Pendapatan yang sah) – Belanja Pegawai] / Jumlah Penduduk Miskin].
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -- sebagai pangsa pasar daerah dan variabel kontrol kebijakan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Sudah menjadi realitas bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberi wacana baru bagi upaya daerah untuk menumbuh-kembangkan wilayah-nya. Salah satu variabel yang diharapkan dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah adalah Dana Alokasi Umum.

Pertimbangan atau alasan perlunya dilakukan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah antara lain adalah untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal dan

untuk mengatasi ketimpangan horisontal antar-daerah.

Adanya perbedaan potensi (*fiscal capacity*) yang dimiliki antar-daerah, tidak dapat disangkal bisa menjadi salah satu alasan wujudnya kecemburuan sosial dan ketimpangan pertumbuhan antar-daerah. Apalagi jika kebutuhan (*fiscal needs*) lebih besar daripada potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk:

1. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
2. Penilaian atas usulan pinjaman daerah;
3. Penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/atau
4. Hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1 menunjukkan besaran kapasitas fiskal antar-daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2009-2013.

Dari data yang tertera pada Tabel 4.1. di bawah ini terlihat bahwa kabupaten kaya sumberdaya alam (Kabupaten Banggai dan Morowali) dengan jumlah penduduk miskin yang relatif kecil memiliki Kapasitas Fiskal yang besar.

Data pada Tabel 4.1. akan lebih baik bila “dibaca” dengan menggunakan hasil perhitungan berdasarkan konsep indeks kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) PMK Nomor 174/PMK.07/2009, maka hasilnya terlihat pada Tabel 2, yang mana hanya ada satu daerah yang relatif konsisten memiliki

indeks kapasitas fiskal lebih besar dari satu yakni Kabupaten Buol, yang berarti kabupaten ini memiliki kapasitas fiskal tinggi sepanjang perjalanan waktu 2009-2013. Hal ini juga bermakna, Kabupaten Buol ini memiliki sumber “surplus” untuk mendanai belanja rutinnya dari PAD. Dalam PMK Nomor 174/PMK. 07/2009 pada pasal 4 ayat (5) dinyatakan sebagai berikut: Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pasal yang sama ayat (6) dinyatakan bahwa; Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
- b. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
- c. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan
- d. Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan Daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Tabel 1. Kapasitas Fiskal di Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Banggai Kepulauan	4,323,105.62	4,716,606.89	7,300,614.03	7,466,511.42	6,675,942.04
2	Kab. Banggai	5,235,197.86	26,368,666.92	6,303,533.17	6,976,545.04	9,094,060.65
3	Kab. Morowali	10,476,983.81	6,708,048.83	7,333,471.71	9,211,395.15	11,262,828.39
4	Kab. P o s o	3,754,737.84	3,865,982.23	5,916,169.09	5,764,964.95	6,789,396.59
5	Kab. Donggala	2,670,270.18	3,997,388.50	7,598,770.62	7,865,157.46	5,735,718.89
6	Kab. Toli Toli	4,531,370.00	4,784,179.27	6,372,167.72	7,191,363.42	7,458,906.61
7	Kab. B u o l	7,830,788.44	7,676,248.19	9,228,880.88	7,226,524.04	8,007,936.57
8	Kab. Parigi Moutong	2,466,568.16	2,726,823.41	3,135,090.64	3,550,467.16	3,370,447.30
9	Kab. Tojo Una-Una	4,387,311.95	5,797,337.53	7,051,859.08	8,148,203.14	7,784,833.13
10	Kab. Sigi	2,231,716.72	6,504,271.67	8,296,925.49	7,119,164.90	8,134,451.88
11	Kota Palu	6,261,426.64	5,795,935.46	6,942,505.79	8,233,958.74	10,691,093.90

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2012 dan 2014 (diolah)

Pada tabel 2 di bawah ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang berbeda antar-daerah bila ditinjau dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2009 Kabupaten Morowali mendapat

kategori sangat tinggi ($IKF > 2$), Kabupaten Banggai, Buol dan Kota Palu masuk kategori tinggi ($1 \leq IKF < 2$), yang lainnya kategori sedang kecuali Kabupaten Sigi yang berkategori rendah ($IKF < 0,5$).

Tabel 2. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	2009		2010		2011		2012		2013	
		IKF	Kategori	IKF	Kategori	IKF	Kategori	IKF	Kategori	IKF	Kategori
1	BangKep	0.878	Sedang	0.657	Sedang	1.064	Tinggi	1.043	Tinggi	0.864	Sedang
2	Banggai	1.063	Tinggi	3.674	Sgt Tinggi	0.919	Sedang	0.974	Sedang	1.177	Tinggi
3	Morowali	2.128	Sgt Tinggi	0.935	Sedang	1.069	Tinggi	1.287	Tinggi	1.457	Tinggi
4	P o s o	0.762	Sedang	0.539	Sedang	0.862	Sedang	0.805	Sedang	0.879	Sedang
5	Donggala	0.542	Sedang	0.557	Sedang	1.107	Tinggi	1.099	Tinggi	0.742	Sedang
6	Toli Toli	0.920	Sedang	0.667	Sedang	0.929	Sedang	1.004	Tinggi	0.965	Sedang
7	B u o l	1.590	Tinggi	1.070	Tinggi	1.345	Tinggi	1.009	Tinggi	1.036	Tinggi
8	Parmout	0.501	Sedang	0.380	Rendah	0.457	Rendah	0.496	Rendah	0.436	Rendah
9	Touna	0.891	Sedang	0.808	Sedang	1.028	Tinggi	1.138	Tinggi	1.007	Tinggi
10	Sigi	0.453	Rendah	0.906	Sedang	1.209	Tinggi	0.994	Sedang	1.053	Tinggi
11	Kota Palu	1.271	Tinggi	0.808	Sedang	1.012	Tinggi	1.150	Tinggi	1.383	Tinggi

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2012 dan 2014 (diolah)

Pada Tahun 2010, yang mendapat kategori sangat tinggi adalah Kabupaten Banggai, kategori tinggi Kabupaten Buol, kecuali Kabupaten Parigi-Moutong yang berkategori rendah, kabupaten-kabupaten lainnya masuk kategori sedang.

Pada Tahun 2011 terdapat enam kabupaten berkategori tinggi yaitu meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, Donggala, Buol, Tojo Una-Una, dan Sigi

serta Kota Palu, Kabupaten Banggai, Poso dan Toli-Toli masuk kategori sedang sementara Kabupaten Parigi-Moutong berkategori rendah.

Pada Tahun 2012 terdapat enam kabupaten dengan IKF yang tinggi, meliputi Kabupaten-kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, Donggala, Toli-toli, Buol dan Tojo Una-una serta Kota Palu. Pada tahun ini terdapat tiga kabupaten ber kategori sedang

yaitu Banggai, Poso dan Sigi, sementara Kabupaten Parigi Moutong masuk kategori rendah. Pada Tahun 2013 terjadi perubahan/pergeseran kabupaten yang masuk kategori tinggi. Pada tahun ini terdapat lima Kabupaten dengan kategori tinggi yaitu Kabupaten-kabupaten Banggai, Morowali, Buol, Tojo Una-una dan Sigi serta Kota Palu. Ada empat kabupaten dengan kategori sedang yaitu Banggai Kepulauan, Poso, Donggala dan Toli-Toli sementara Kabupaten Parigi Moutong tetap dengan kategori rendah. Naik turunnya kategori ini pada kabupaten/kota sebenarnya tidak perlu mengherankan, karena DAU dari tahun ke tahun memang meningkat, namun peningkatan pada tiap kabupaten/kota, tidak sama, demikian halnya dengan DBH atau pun Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Tahun 2010-2013 berkategori rendah, disebabkan karena kabupaten ini menyimpan jumlah penduduk miskin terbesar.

Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup (Suryawati,2005:18):

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.

Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Dalam kaitannya dengan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, kemiskinan biasanya dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Kemiskinan absolut (jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya)
2. Kemiskinan relatif (distribusi pendapatan atau pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing Golongan Pendapatan)

Kemiskinan biasanya dilihat dari garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi individu, dalam hal ini Garis kemiskinan menghitung pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar (makanan pokok) dan pengeluaran diluar makanan. Oleh karena itu maka BPS mengukur kemiskinan dengan dua cara :

1. *Pendekatan Kebutuhan dasar (basic needs approach)*, pendekatan ini mengukur kemiskinan melalui ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar/makanan yg dipatok 2.100 kalori perhari.
2. *Head Count Index*, mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai rupiah dengan pendapatan Minimal US\$ 1 atau US\$ 2 per hari dalam dolar yang dihitung berdasarkan paritas daya belinya (*Purchasing Power Parity/PPP*).

Cakupan kemiskinan adalah Sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan rill minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan Internasional”. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antarnegara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu Negara, dan juga memperhitungkan

perbedaan tingkat harga antarnegara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari U\$1 atau U\$2 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*).

Terdapat pendapat di kalangan pembuat kebijakan bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Selain tabungan keuangan, golongan miskin cenderung membelanjakan tambahan pendapatan untuk memperoleh gizi yang lebih baik, pendidikan untuk anak-anak mereka, perbaikan kondisi rumah, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang lebih mencerminkan investasi dan bukan konsumsi, khususnya jika dilihat dari sudut pandang orang miskin.

Pengurangan dramatis dalam kemiskinan tidak harus saling berlawanan dengan pertumbuhan yang tinggi, seperti yang terlihat dalam berbagai studi kasus maupun dalam data perbandingan antar-negara.

Tentu saja, hubungan yang dekat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan

yang terdiri di antara golongan miskin tidak begitu saja mengindikasikan hubungan sebab akibat.

Sampai sekian jauh, kita telah memperoleh gambaran secara garis besar atas masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan di Negara-negara berkembang. Kita telah memahami bahwa perpaduan tingkat pendapatan perkapita yang rendah dan distribusi pendapatan sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan absolut yang parah.

Tingginya tingkat pendapatan per kapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan absolut. Pemahaman terhadap hakikat distribusi ukuran pendapatan merupakan landasan dasar bagi setiap analisis masalah kemiskinan.

Dari data pada tabel 3 ini terlihat bahwa kalau ditinjau dari jumlah penduduk miskin maka Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, sementara yang terkecil adalah Kota Palu, namun bila ditinjau dari sisi persentase maka Kabupaten Tojo Una-una yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dan Kota Palu yang terkecil.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	%	Jumlah Penduduk Miskin (000)	%	Jumlah Penduduk Miskin (000)	%	Jumlah Penduduk Miskin (000)	%	Jumlah Penduduk Miskin (000)	%
Banggai Kepulauan	36.1	21.99	33.5	19.48	31.8	18.08	30.2	17.03	29.4	16.3
Banggai	45.3	14.6	39.1	12.07	37.2	11.25	35.3	10.48	33.8	9.81
Morowali	42.3	22.53	41.9	20.29	39.8	18.85	37.7	17.25	35.4	15.92
P o s o	41.6	23.29	45.3	21.42	43	20.1	40.8	18.46	41.3	18.22
Donggala	54.1	18.91	53.9	19.43	51.1	18.03	48.4	17.02	49.6	17.18
Toli Toli	37.4	17.83	34.2	16.17	32.4	15.03	30.7	14.12	30.7	13.86
B u o l	25.7	20.68	24.8	18.68	23.5	17.4	22.3	15.99	21.6	15.06
Parigi Moutong	77.9	19.72	83.4	20.11	79.1	18.7	75.0	17.36	75.5	17.03
Tojo Una-Una	52.3	26.23	33.2	24.07	31.5	22.37	29.9	20.97	29.7	20.61
Sigi	40.2	18.91	32.4	15.1	30.8	14.03	29.2	13.2	27.6	12.27
Palu	30.1	9.19	33.5	9.98	31.8	9.24	30.1	8.58	25.9	7.24
SULAWESI TENGAH	489,8	18,98	475,0	18,07	432.1	16.04	409.6	14.94	400.4	14.32

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah Dalam Angka (berbagai tahun publikasi).

Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Tengah

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa perencanaan pembangunan ekonomi, sangat memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan dan target-target yang akan dicapai.

Oleh karena itu maka berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Menurut Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

unit usaha dalam suatu daerah. Dengan begitu maka sasaran pembangunan diharapkan dapat dicapai dengan tepat.

Dalam konteks ini, hasil dari strategi dan kebijakan yang telah diambil dimasa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi.

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan(riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. PDRB Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku Tahun 2009-2013 (Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	PDRB (jutaan Rupiah)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Banggai Kepulauan	1.302.584	1.495.987	1.721.949	1.961.432	2,212,008
2	Kab. Banggai	3.414.639	4.165.996	5.151.011	6.482.465	8,080,946
3	Kab. Morowali	2.981.838	3.724.008	4.730.447	5.853.590	3,061,475
4	Kab. P o s o	1.861.806	2.141.600	2.459.033	2.826.635	3,305,166
5	Kab. Donggala	3.224.968	3.750.271	4.430.109	5.238.652	5,882,456
6	Kab. Toli Toli	2.341.191	2.698.243	3.104.321	3.529.355	4,091,982
7	Kab. B u o l	1.139.673	1.310.312	1.512.504	1.753.480	2,044,676
8	Kab. Parigi Moutong	5.514.609	6.323.281	7.217.787	8.248.049	9,561,013
9	Kab. Tojo Una-Una	1.052.828	1.204.017	1.383.764	1.588.002	1,833,905

10	Kab. Sigi	2.763.450	3.149.313	3.583.781	4.115.169	4,786,689
11	Kota Palu	5.332.677	6.145.475	7.131.148	8.283.620	9,728,261

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, PDRB Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah 2009-2013

Data PDRB Kabupaten/Kota yang disajikan pada Tabel 4.4. berdasarkan harga berlaku untuk rentang waktu Tahun 2009-2013.

Berdasarkan data tersebut kelihatan bahwa Kota Palu memiliki PDRB terbesar selama perjalanan waktu Tahun 2009-2013 (dari Rp 5,33 trilyun pada Tahun 2009 menjadi Rp 9,72 Trilyun pada Tahun 2013), disusul oleh Kabupaten Parigi Moutong (dari Rp 5,51 Trilyun pada Tahun 2009 menjadi Rp 9,56 Trilyun pada Tahun 2013), kemudian Kabupaten Banggai dengan PDRB sebesar Rp 3,41 Trilyun pada Tahun 2009 menjadi Rp 8,08 Trilyun pada Tahun 2013). Dua kabupaten dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

t-stat (-1.16) (1.47) R2 = 0.46
dw-stat = 1.14

Ketiga model tersebut akan dipilih model yang paling layak untuk dilakukan analisisnya.

Hubungan Kapasitas fiskal dan PDRB terhadap Kemiskinan

Dengan menggunakan metode *Pooled Least Squares* maka diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\text{Poor} = 1.27\text{E-}06\text{kap_fiskal}_{ij} + 6.65\text{E-}06\text{PDRB}_{2t} + u_i$$

t-stat (2.35) (7.34) R2 = - 0.67 dw-stat = 0,30

Dengan menggunakan metode model *fixed effect* maka diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\text{Poor} = 49.49 - 3.66\text{E-}0706 \text{ kap_fiskal}_{ij} - 1.90\text{E-}06 \text{ PDRB}_{2t} + u_i$$

t-stat (-2.49) (-4.61) R2 = 0.95 dw-stat = 1.55

Dengan menggunakan metode model *Random effect* maka diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\text{Poor} = 37.31 - 1.82\text{E-}07\text{kap_fiskal}_{ij} - 9.16\text{E-}07\text{PDRB}_{2t} + u_i$$

Pemilihan Model yang Layak di Analisis:

1) FEM dan REM, menggunakan uji Hausman, yaitu:

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: FEM

Test periode random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
--------------	-------------------	-------------	------

Period random	16.412079	2	0.0003
---------------	------------------	----------	--------

Period random effects test comparisons

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob
----------	-------	--------	------------	------

X1?	-0.00000	-0.00000	0.00000	0.0005
X2?	0.00000	-0.000002	0.0000	0.0001

Period random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Square

Sample: 2009 2013

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
--	-------------	------------	-------------	-------

C	39.52718	3.060418	12.91561	0.0000
---	----------	----------	----------	--------

X1?	-1.63E-07	1.58E-07	-1.036165	0.3067
-----	-----------	----------	-----------	--------

X2?	3.14E-07	6.83E-07	0.458953	0.6489
-----	----------	----------	----------	--------

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.970570	Mean dependent var	39.64182
Adjusted R-squared	0.958178	S.D. dependent var	14.61764
S.E. of regression	2.989366	Akaike info criterion	5.276434
Sum squared resid	339.5797	Schwarz criterion	5.896883
Log likelihood	128.1019	Hannan-Quinn criter.	5.516367
F-statistic	78.32439	Durbin-Watson stat	1.712324
Prob(F-statistic)	0.000000		

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f	Prob.
Cross-section Random	11.556386	2	0.0031

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.3411
X2?	0.000000	0.000001	0.000000	0.0377

Perhitungan menggunakan program **eviews**. nilai *Hausman_test* berdasarkan hasil pengujian adalah 16,41 > nilai χ^2_{Tabel} (df =K= 2, α = 5%) sebesar 5,99, maka hipotesis nol ditolak. Jadi model yang terpilih berdasarkan uji *Hausman test* adalah model **fixed effect**

1) FEM dan PLS

Perhitungan diatas menghasilkan nilai *CHOW Statistics* (F_{Stat}) sebesar **11,39** > nilai F_{Tabel} (numerator = 2, denominator = 43, α = 5%) sebesar 5,18 ,artinya hipotesis nol ditolak. Jadi model yang dipilih

berdasarkan uji CHOW adalah model **fixed effect**.

2) REM dan PLS

Nilai *LM_test* (χ^2_{Stat}) hasil pengujian sebesar **1,72** < nilai χ^2_{Tabel} (df =K= 2, α = 5%) sebesar 5,99, artinya hipotesis diterima. Jadi model yang terpilih berdasarkan uji *LM* adalah model **PLS**.

Dengan dasar pengujian ini, maka model data panel yang akan dianalisis didasarkan pada FEM (Fixed Effect Model) Dengan hasil, yaitu:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C?	49.49076	1.820488	27.18544	0.0000
X1?	-3.66E-07	1.46E-07	-2.497902	0.0165
X2?	-1.90E-06	4.10E-07	-4.617530	0.0000

Effects Specification

	SD	Rho
Cross-section fixed (dummy variables)		
Period random	0.000000	0.00000
Idiosyncratic random	2.989366	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.957391	Mean dependent var	39.64182
Adjusted R-squared	0.945217	S.D. dependent var	14.61764
S.E. of Regression	3.421367	Sum squared resid	491.6417
F-statistic	78.64246	D-W stat	1.553341
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.957391	Mean dependent
-----------	----------	----------------

Sum squared	var	39.64182
Resid	491.6417	D-W stat 1.553341

Interpretasi model

- 1) Pada model *fixed effect*, intersep terletak pada masing-masing kabupaten/ kota
- 2) Berdasarkan uji t-statistik kapasitas fiskal bertanda negatif dan secara statistik signifikan terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa ketika kapasitas fiskal meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
- 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertanda negatif dan secara statistik signifikan terhadap kemiskinan berarti jika PDRB meningkat akan menurunkan kemiskinan.
- 4) R² menunjukkan variasi proporsi kontribusi variabel kapasitas fiskal dan PDRB terhadap kemiskinan sebesar 96,3%.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan bahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kapasitas fiskal masing-masing daerah berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Hal ini berarti ketika kapasitas fiskal meningkat, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Perbedaan kapasitas fiskal masing-masing daerah akan mempengaruhi juga pengalokasian atau skala prioritas dan juga akan bervariasi;
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan berarti ada stimulus fiskal terhadap kemiskinan.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan PDRB

- sebagai solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan;
- b. Adanya pelimpahan kewenangan ke daerah berarti pemerintah harus mampu meningkatkan tanggung jawab terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerahnya;
 - c. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber belanja, dengan asumsi PAD tersebut benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan publik. PAD berasal dari pajak dan retribusi, sehingga untuk meningkatkan PAD pemerintah harus meningkatkan aktivitas ekonomi. Meningkatnya aktivitas ekonomi ini akan mendorong peningkatan pendapatan sehingga sumber-sumber pajak dapat meningkat dan PAD juga akan meningkat.
 - d. Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah negara, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
 - e. Jika hanya sekedar mengurangi kemiskinan, pemerintah dapat saja memberikan bantuan langsung tunai (BLT), pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar gratis. Namun, memberdayakan masyarakat tak cukup dengan bantuan jaring pengaman sosial tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah mengentaskan kemiskinan, dengan mencari akar masalah kemiskinan lalu mengatasinya;
 - f. Kebijakan yang paling tepat adalah dengan menciptakan lapangan kerja bermutu. Untuk maksud ini, tak ada pilihan lain kecuali memberdayakan sektor pertanian, membangun perdesaan dengan sungguh-sungguh, dan memacu industrialisasi di

perdesaan;

- g. Pemerintah Daerah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi agar supaya dapat mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan (welfare) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel yang sangat penting bagi upaya menanggulangi kemiskinan di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
- Ahmad, Ehtisham, Bert Hofman (Maret 2000). “*Decentralization-Opportunities and Risks*”, IMF and World Bank Resident Mission.
- Hyman, David N. (1996) *Public Finance A Contemporary Aplication of Theory to Policy*, Fifth Edition, The Dryden Press.
- Keefer, Philip and Khemani, *Democracy, Public Expenditures, and the Poor*, 2003, Word Bank Policy Research Working Paper 3164.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lesta Karolina Sebayang, Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Sebagai Political Proses Dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesiaa, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Republik Indonesia. Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition*. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Silver, C., Iwan J.A., and Larry S (2001) “Intergovernmental Transfers and Decentralisation in Indonesia”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37(3): 345-361.
- Subiyantoro, Heru (2004), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Badan Analisa Fiskal, Jakarta: Departemen Keuangan